

### **BAB III**

#### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dibahas dan dianalisis beberapa faktor dan aspek-aspek apa saja yang menjadi kaitan dalam rangka implementasi alokasi APBD pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, yang terangkum dalam sub bab atau bagian-bagian yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Adalah sebagai berikut:

#### **A. PERNYATAAN VISI DAN MISI**

##### **VISI**

Visi yang dirumuskan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, adalah sebagai berikut:

**“Pendidikan berkualitas, berwawasan global dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional”.**

##### **MISI**

Dalam rangka mewujudkan visi yang diinginkan, maka Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta merumuskan misi sebagai berikut:

- **Mewujudkan pendidikan berkualitas yang berakar budaya adiluhung.**
- **Mewujudkan pendidikan berwawasan global dan berbasis teknologi informasi.**
- **Mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai.**

## **B. DATA ALOKASI APBD UNTUK PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA**

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta terus diupayakan. Oleh karena itu urusan pemerintahan yang memberikan multiplier effect paling tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat dialokasikan anggaran yang signifikan. Dari sisi strategi penganggaran, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan melalui tiga cara,: Pertama, adalah pengalokasian anggaran santunan kepada masyarakat. Alokasi anggaran ini ditujukan untuk menyelamatkan warga masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan agar dapat terpenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta perbaikan sarana prasarana dasar permukiman. Untuk kebijakan santunan, data yang digunakan adalah sesuai data Kartu Menuju Sejahtera (KMS) yang dikeluarkan setelah melalui proses verifikasi. Kedua, mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat. Alokasi anggaran ini dilaksanakan dengan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung melalui anggaran penguatan modal baik pinjaman maupun bantuan, dan tidak langsung melalui perbaikan berbagai fasilitas sarana prasarana perkotaan dan perekonomian seperti jalan dan manajemen lalu lintas, pasar tradisional, penataan pedagang kaki lima dan sebagainya. Ketiga, adalah peningkatan kapasitas pelayanan publik melalui penguatan kelembagaan yang dilaksanakan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan

sarana prasarana pemerintahan dan peningkatan sistem administrasi pemerintahan dan pembangunan<sup>15</sup>.

Selanjutnya berikut ini gambaran APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 dalam hal urusan Pendidikan. Kebijakan anggaran pendidikan diarahkan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, dengan sasaran peningkatan akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas anak didik dan guru, peningkatan sarana prasarana pendidikan, dan peningkatan pendidikan informal di masyarakat. Secara operasional anggaran pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran pendidikan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan proporsi anggaran pendidikan terhadap APBD minimal 20%. Mulai Tahun 2006 proporsi anggaran pendidikan telah memenuhi ketentuan tersebut, dan untuk Tahun 2007 telah mencapai 25%.
2. Penyediaan anggaran jaminan Pendidikan Daerah sejumlah Rp 15.857.700.000,- (lima belas milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
3. Penerimaan siswa baru untuk SMP, SMA dengan sistem on line. Sistem ini bertujuan untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penerimaan siswa baru. Dalam jangka panjang sistem ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta.

---

<sup>15</sup> [www.google.com](http://www.google.com)

4. Penyediaan anggaran biaya operasional sekolah negeri sejumlah Rp 8.679.462.600,- (delapan milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan untuk jenjang pendidikan TK hingga SMA/SMK termasuk Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar. Parameter pengalokasian pada tiap satuan pendidikan ditentukan oleh ketersediaan sarana prasarana, kemampuan komite sekolah, dan jumlah rombongan belajar. Dengan parameter tersebut diharapkan alokasi anggaran dapat mencerminkan prinsip akuntabilitas, keadilan, responsibilitas, dan transparansi.
5. Pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dialokasikan anggaran sejumlah Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang antara lain digunakan untuk subsidi siswa dan guru berprestasi serta event-event kegiatan siswa sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan bantuan untuk peningkatan mutu beberapa sekolah sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
6. Operasional sekolah swasta dianggarkan sejumlah Rp 389.800.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk peningkatan mutu dianggarkan sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
7. Peningkatan pengelolaan perpustakaan daerah dengan anggaran sejumlah Rp 236.444.500,- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah). Kegiatan ini dalam jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam budaya

- membaca sedangkan jangka pendek untuk meningkatkan eksistensi perpustakaan komunitas tingkat RW dialokasikan anggaran sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
8. Peningkatan mutu penyelenggaraan proses belajar mengajar melalui peningkatan status guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap sekolah menjadi pegawai tidak tetap Pemerintah Kota Yogyakarta. Pengangkatan menjadi pegawai tidak tetap Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut dilaksanakan secara bertahap melalui proses seleksi yang dilaksanakan pada tahun 2007 dan 2008. Untuk tahun 2007 diangkat sejumlah 578 orang yang terdiri dari Guru Tidak Tetap sejumlah 309 orang dan Pegawai Tidak Tetap sejumlah 269 orang. Pengangkatan pegawai tidak tetap tersebut berimplikasi kepada penganggaran honorarium kurang lebih sejumlah Rp 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah). Kemudian untuk insentif GTT dan PTT disediakan anggaran sejumlah Rp 10.888.436.000,- (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
  9. Peningkatan kualitas guru melalui pendidikan penyetaraan dengan anggaran sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  10. Peningkatan gizi siswa, melalui pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah. Untuk sekolah TK dialokasikan anggaran sejumlah Rp 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah), dan untuk SD/MI sejumlah Rp 2.591.750.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Rehabilitasi gedung SD melalui Dana Alokasi Khusus dan pendampingannya dengan anggaran sejumlah Rp 14.950.570.000,- (empat belas milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pengadaan mebelair ruang kelas serta rehabilitasi gedung SMP, SMA, dan SMK dengan anggaran sejumlah Rp 1.278.645.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
12. Peningkatan sarana prasarana fisik lainnya adalah lantainisasi dengan keramik untuk sekolah-sekolah dengan anggaran sejumlah Rp 613.000.000,- (enam ratus tiga belas juta rupiah), pemasangan con block pada berbagai halaman SD dengan anggaran sejumlah Rp 929.438.750,- (sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Dengan target adalah agar seluruh lantai sekolah sudah berupa keramik dan halaman SD di Kota Yogyakarta sudah dipasang con block. Disamping itu untuk meningkatkan kesehatan sekolah, secara bertahap dilakukan penggantian bak kamar mandi dengan menggunakan kran pada sekolah negeri, yang dianggarkan sejumlah Rp 143.461.388,- (seratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah). Sedangkan kranisasi sekolah swasta dianggarkan sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
13. Pembangunan sarana prasarana pendidikan, seperti untuk rehabilitasi gedung sekolah dan mebelair dengan anggaran sejumlah Rp

14.490.570.000,- (empat belas milyar empat ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

14. Pembangunan lanjutan Taman Pintar dengan anggaran sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

15. Pengembangan pendidikan kejuruan melalui pengadaan alat praktek kerja dengan anggaran sejumlah Rp 3.978.436.600,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah).

16. Pendidikan usia dini (PAUD) dialokasikan anggaran bantuan kepada PAUD di tingkat RW sejumlah Rp 484.500.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

17. Penganggaran untuk bantuan keagamaan sejumlah Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Bantuan tersebut dialokasikan untuk bantuan pasca gempa fasilitas keagamaan bantuan kepada lembaga keagamaan, bantuan peningkatan pengembangan agama, bantuan peningkatan pembangunan pendidikan agama, dan bantuan kepada kepanitiaan kegiatan keagamaan<sup>16</sup>.

Alokasi anggaran pendidikan mulai tahun 2003 ditingkatkan, pada tahun 2006 telah dialokasikan anggaran pendidikan lebih dari 20% dari APBD di luar gaji guru. Perhitungan anggaran pendidikan adalah dengan membandingkan anggaran pendidikan di luar gaji pada Dinas Pendidikan dengan keseluruhan belanja APBD di luar gaji. Proporsi anggaran pendidikan

---

<sup>16</sup> *Ibid*

pada tahun anggaran 2004 sejumlah 12,53%, tahun anggaran 2005 sejumlah 16,96%, tahun anggaran 2006 sejumlah 22,10%, dan tahun anggaran 2007 sejumlah 22,26%. Anggaran jaminan pendidikan mengalokasikan anggaran untuk Jaminan Pendidikan Daerah (bea siswa) dari tingkat TK sampai SMA/SMK, sehingga tidak ada anak usia sekolah yang tidak sekolah karena alasan biaya. Anggaran Jaminan Pendidikan Daerah tahun 2003 sampai dengan 2008 adalah sebagai berikut :

**Tabel III.1.**

**Anggaran Jaminan Pendidikan Daerah**

Tahun Anggaran	(Rp.)	%
2003	777.780.000	10,20
2004	1.878.000.000	12,53
2005	3.237.260.000	16,96
2006	10.199.334.000	22,10
2007	14.302.140.000	22,26
2008	18.457.345.000	23,02

Sumber : APBD Kota Yogyakarta<sup>17</sup>

**C. PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN ALOKASI APBD  
BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA**

Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah, yang kemudian dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2008. Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mengatur alokasi anggaran jaminan pendidikan daerah (bea siswa) seperti sasaran dan mekanisme pemberiannya. Jaminan Pendidikan Daerah

<sup>17</sup> Copyright Badan Informasi Daerah 2007, [www.google.com](http://www.google.com).

diberikan kepada peserta didik penduduk pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) dan peserta didik yang berprestasi akademik.

Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). Tujuan dari peraturan walikota ini adalah dalam rangka pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah agar dapat berjalan dengan akuntabel, transparan dan partisipatif. Adanya pedoman penyusunan dan pengelolaan APBS ini mungkin yang pertama di Indonesia. Dengan adanya pedoman tersebut maka akan ada standar mekanisme pengelolaan keuangan sekolah.

#### **D. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI APBD BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu implementasi kebijakan teori model George C. Edward III. Dimana terdapat empat variabel dalam implementasi kebijakan publik, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap kecenderungan), dan struktur birokrasi<sup>18</sup>.

##### **1. KOMUNIKASI**

Dalam mengimplementasikan kebijakan, pemerintah dan para pembuat kebijakan harus mentransmisikannya kepada personel yang tepat dan perintah tersebut harus jelas, akurat dan konsisten. Komunikasi dalam konteks implementasi kebijakan, terdapat tiga aspek pokok, yaitu:

---

<sup>18</sup> C. Edward III, George, *Implementing Public Policy*, (1980, 17).

transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Yang mana dalam komunikasi internal di Dinas pendidikan Kota Yogyakarta tersebut yaitu dengan menggunakan metode musyawarah secara mendalam dan intensif atas berbagai permasalahan yang mungkin muncul, sehingga dalam perjalanannya hal-hal seperti mis-komunikasi diharapkan akan sangat jarang ditemui. Kemudian selain dari pada itu, proses komunikasi eksternal yang terjadi di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yaitu dengan mengalokasikan anggaran pokok dimenitif (suatu anggaran yang sudah pasti) dalam dokumen pelaksanaan anggaran<sup>19</sup>.

a. Transmisi Informasi Kebijakan

Menurut nara sumber dalam wawancaranya menuturkan bahwa: "Proses pentransmision informasi kebijakan pada dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tersebut yaitu dengan cara mengadakan sebuah forum pertemuan secara periodik setiap sebulan sekali, sehingga proses pentransmision informasi tersebut bisa dilaksanakan dan terkontrol dengan baik". Berikut adalah contoh kegiatan dari proses tersebut : Pembinaan karir pegawai (Kepala Sekolah secara keseluruhan di kota Yogyakarta), yang bertempat di aula kantor dinas Pendidikan, untuk sosialisasi program kegiatan dalam kebijakan yang telah dirumuskan, sehingga diharapkan bisa tepat sasaran dan berorientasi pada kualitas. Cara pengimplementasiannya dengan menjabarkan atau mengarahkan, menginformasikan dalam tata laksana

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Samiyo, S.Pd.

secara reguler. Pelaksanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian, yaitu Rr. Suhartati, SH.

b. Kejelasan Informasi Kebijakan

Dikarenakan struktur organisasi pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang *flat*/datar, jarak yang berdekatan, kemudian dengan diadakannya sebuah forum pertemuan secara periodik tersebut maka proses implementasi kebijakan yang berlangsung sudah diterima dengan jelas.

c. Konsistensi Informasi Kebijakan

Pada aspek pokok berikutnya, syarat lain dalam implementasi, agar berlangsung secara efektif maka perintah-perintah pelaksana juga harus konsisten. Agar faktor-faktor negatif berikut yang menghasilkan komunikasi tidak jelas dan tidak konsisten, seperti: Kompleksitas kebijakan publik; Banyaknya tujuan dari pelbagai kebijakan, masih bisa untuk diperbaiki. Senada dengan penjelasan di atas tersebut yang saling mendukung dan berjalan dengan baik maka untuk konsistensinya informasi kebijakan dari para implementornya pun bisa terlaksana secara konsisten.

## 2. SUMBERDAYA

Jika ditinjau dari sumberdaya yang tersedia baik pada instansi dinas maupun pada subyek-subyek yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam proses implementasi kebijakan, yang diukur melalui:

a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan penuturan dari nara sumber pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, dalam kaitannya mengenai ketersediaan Sumber Daya Manusia yang ada dalam struktur dan staf jabatan pada dinas tersebut sudah cukup memadai, yaitu berjumlah 124 orang. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan adanya keterangan dalam bentuk tabel secara lengkap dan padat seperti di bawah ini:

**Tabel III.2.**

**SDM pada Staf Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta**

No	Nama	NIP	Jabatan	Tkt Penddkn	Gol/Ruang
1	Siti Fatimah Noorachim	130698159	Staf Bidang Dikdas	SMA	IV/a
2	Dra. Sukaptiningsih	131596117	Staf Bidang Bangdik	S-1	IV/a
3	Sumini	140171913	Staf UPT Perpustakaan	SMA	IV/a
4	Drs. Kamim	130	Staf Seksi Kesiswaan	S-1	IV/a
5	Noryanto	130	Staf Seksi Kesiswaan	SMA	IV/a
6	Slamet Haryadi	130899524	Staf Subbag Umum	SMA	III/a
7	Suwondo	131407864	Staf Subbag Umum	SMA	III/b
8	Tri Yuli Pujiastuti	131587375	Staf Subbag Umum	SMA	III/b
9	Gendaryani	131866333	Staf Subbag Umum	SMA	III/b
10	Joko Riyanto	490022377	Staf Subbag Keuangan	SMA	III/a
11	Mursidah, S.IP	130906074	Staf Subbag Keuangan	S-1	III/c
12	Sumaryati	490015207	Staf Subbag Keuangan	SMA	III/b
13	Sugiyono	131406468	Staf Subbag Keuangan	SMA	III/b
14	Mínuk Puspaningsih	490028547	Staf Subbag Keuangan	SMA	III/b
15	Simun, SE	130811002	Staf Subbag Keuangan	S-1	III/b
16	Kusmi Wardani	140128314	Staf Subbag Keuangan	SMA	III/b
17	Sri Hastuti	130915710	Staf Subbag Kepegawaian	SMA	III/b
18	Suhardi	130676067	Staf Subbag Kepegawaian	SMA	III/a
19	Siti Meimunah	130788441	Staf Subbag Kepegawaian	SMA	III/b
20	Sri Sudarsih, S.Pd	131762140	Staf Subbag Kepegawaian	S-1	III/a
21	Sugiyatmi	490018663	Staf Subbag Kepegawaian	SMA	III/b
22	Marwoto, SH	131669493	Staf Subbag Kepegawaian	S-1	III/b
23	YB Tri Haryono	131645901	Staf Bidang Dikdas	SMA	III/b
24	Bimoseno	490020594	Staf Bidang Dikdas	SMA	III/b
25	Mujiyati	490022669	Staf Bidang Dikdas	SMA	III/b
26	Endang Dwi Purwani	130903051	Staf Bidang Dikdas	SMA	III/b
27	Giyanto	490010509	Staf Bidang Dikdas	SMA	III/b
28	Mujiyono	131112132	Staf Bidang Dikdas	SMA	III/b

**Tabel III.3.**  
**SDM pada Staf Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta**

No	Nama	NIP	Jabatan	Tkt. Pndckn	Gol/Ruang
29	Isdiyati	130905701	Staf Bidang Dikmen	SMA	III/b
30	Sarjiyo	130901787	Staf Bidang Dikmen	SMA	III/a
31	Tri Yudaningsih, S.Pd	131152237	Staf Bidang Dikmen	S-1	III/c
32	Drs. Rohmad, M.Pd	131152237	Staf Bidang Dikmen	S-2	III/d
33	Drs. Satrio Budi Santoso	131842444	Staf Bidang Dikmen	S-1	III/c
34	Surtini Widayati	130903047	Staf Bidang PNF	SMA	III/b
35	Teguh Setyo Handoyo	131400191	Staf Bidang PNF	SMA	III/a
36	Wartoyo	131343036	Staf Bidang PNF	SMA	III/c
37	TH. Emi Hendrastuti	490021598	Staf Bidang PNF	SMA	III/b
38	Drs. Silatun Najah	130906880	Staf Bidang PNF	S-1	III/d
39	Murniyati	131619452	Staf Bidang PNF	SMA	III/b
40	F. Sri Istiningsih	130903043	Staf Bidang Bangdik	SMA	III/b
41	Drs. Rusmadi Giri	131842438	Staf Bidang Bangdik	S-1	III/d
42	Suradal	131343034	Staf Bidang Bangdik	SMA	III/c
43	P. Sudarmaji	490021067	Staf Bidang Bangdik	SMA	III/b
44	Isyuliaty	130811503	Staf Bidang Bangdik	SMA	III/c
45	Budi Irianto	131464106	Staf Bidang Bangdik	SMA	III/b
46	Tuti Husadari	490016758	Staf UPT Penjamin Pendidikan	SMA	III/b
47	Ijon Sarjono	131549636	Staf Bidang Dikdas	SMA	III/b
48	Veridanis	131887268	Staf UPT SKB	SMA	III/a
49	Rigen Ariyati	131887268	Staf UPT SKB	SMA	III/a
50	Erung Heryati, S.Pd	130597130	Staf Dinas Pendidikan	S-1	III/d
51	Sri Rahayu	130597130	Staf Dinas Pendidikan	SMA	III/d
52	Drs. Rochmat sudarsono		Staf Dinas Pendidikan	S-1	III/a
53	Sudijarto, S.Pd		Staf SKB	S-1	III/b
54	Eka Yuniarta, S.Pd		Staf SKB	S-1	III/b
55	Agus Trimadi, S.Ip	132090840	Staf Subbag Keuangan		II/d
56	Azimah	130903050	Staf Subbag Umum	SMA	II/c
57	Lilik Sulisty	131965608	Staf Subbag Umum	SMA	II/d
58	Sumardi	131647492	Staf Subbag Umum	SMA	II/c
59	Tukiman	131587573	Staf Subbag Umum	SMA	II/c
60	Ani Widayati, Amd	490032106	Staf Subbag Keuangan, PE	D-3	II/c
61	Darmawan	132019665	Staf Subbag Keuangan, PE	SMA	II/c
62	Mujino, S.Pd	490031654	Staf Subbag Keuangan, PE	S-1	II/c
63	Parmin, S.Pd	131583635	Staf Subbag Keuangan, PE	S-1	II/b
64	Ruki hernawati	490035131	Staf Subbag Keuangan, PE	SMA	II/a
65	Hasyim	132093800	Staf Subbag Kepegawaian	SMA	II/d
66	Pracoyo	130875852	Staf Subbag Kepegawaian	SMA	II/a

**Tabel III.4.**  
**SDM pada Staf Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta**

No	Nama	NIP	Jabatan	Tkt. Pndkkn	Gol/Ruang
67	Agus Ikwantoro	490034410	Staf Subbag Kepegawaian	SMA	II/a
68	Suprihatin	130818619	Staf Bidang Dikdas	SMA	II/d
69	Slamet Tukljo	130741308	Staf Bidang Dikmen	SMA	II/d
70	Suyatmi	132221054	Staf Subbag Keuangan, PE	SMA	II/b
71	Deni Sudaryanto	490030794	Staf Bidang Bangdik	SMA	II/c
72	Sumaryanto	130741144	Staf Bidang Bangdik	SMA	II/b
73	Haryanto	490037647	Staf Subbag Umum	SMA	II/a
74	Edi Resmi Utama	490037652	II/a, CPNS	SMA	II/a
75	Nanik Suharni	490029406	Staf Subbag Umum	SMP	I/d
76	Andriyanto	490037648	Staf Subbag Umum	SMP	I/c
77	Kawit Raharjo	490037651	Staf Subbag Umum	SMP	I/a
78	Suprihatin	490037649	Staf Subbag Umum	SMP	I/a
79	Ponijo	490037650	Staf Subbag Umum	SMP	I/c
80	Dra. Sri Indah Budiarti, M.Si	130929475	Pengawas Sekolah	S-2	IV/a
81	Drs. Ghofari Latief	130931834	Pengawas Sekolah	S-1	IV/a
82	Drs. Sumaryanto Marzuki	130798001	Pengawas Sekolah	S-1	IV/a
83	Drs. Mochanam, M.Si	130531081	Pengawas Sekolah	S-1	IV/a
84	Drs. Subroto Suprihatin	130888694	Pengawas Sekolah	S-1	IV/a
85	Dra. Muchniatun	130927281	Pengawas Sekolah	S-1	IV/a
86	Drs. Suwidyo	130790602	Pengawas Sekolah	S-1	IV/a
87	Drs. Sumaryono	130683964	Pengawas Sekolah	S-1	IV/a
88	Drs. Asmuni	490014545	Pengawas Sekolah	S-1	IV/a
89	Drs. Purwaka	490014653	Pengawas Sekolah	S-1	IV/a
90	Drs. Riyanta	130656654	Pengawas Sekolah	S-1	IV/a
91	Tyasna Tamtama, S.Pd	131582809	Pengawas Sekolah	S-1	IV/a
92	Drs. Purwanto	130740736	Pengawas Sekolah	S-1	IV/a
93	Dra. Nurjanah	130392949	Pengawas Sekolah	S-1	IV/a
94	Dra. Pardiayanti	130815357	Pengawas Sekolah	S-1	IV/a
95	Dra. Sri Astuti	130909882	Pengawas Sekolah	S-1	IV/a
96	Dra. Puji Lestari	131300277	Pengawas Sekolah	S-1	IV/a
97	Dra. Wulas Minarji	131267863	Pengawas Sekolah	S-1	IV/a
98	Dra. Sri Eni Utaminingsih	131403257	Pengawas Sekolah	S-1	IV/a
99	Dra. Is Susilowati	130566669	Pengawas Sekolah	S-1	IV/a
100	Dra. Siti Baroroh	130740393	Pengawas Sekolah	S-1	IV/a
101	Suyanto, S.Pd	130524174	Penilik	S-1	IV/a
102	Drs. Wagiman	131605522	Pamong Belajar	S-1	IV/a
103	B. Mahari Isubahgun, SH	132105254	Penilik	S-1	III/d
104	Etri Jumiastuti, S.Pd	130906060	Penilik	S-1	III/c
105	Noor Wayuni	130790981	Penilik	SMA	III/c

**Tabel III.5.**  
**SDM pada Staf Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta**

No	Nama	NIP	Jabatan	Tkt. Pndkkn	Gol/Ruang
106	Dra. Urai Ratnawati	130604585	Penilik	S-1	III/d
107	Hardi Prawoto, S.Pd	131630741	Penilik	S-1	III/b
108	Endang Sri Rusmartuti; S.Pd	130790991	Penilik	S-1	III/c
109	Sigit Arinto, BA	131680710	Penilik	D-3	III/b
110	Sunardi Y	131292620	Penilik	SMA	III/d
111	Sudarmawi, S.Pd	132221058	Pamong Belajar	S-1	III/b
112	Drs. Agus Wahib	132252815	Pamong Belajar	S-1	III/b
113	Drs. Krisna Purnama	132133007	Pamong Belajar	S-1	III/b
114	Tony Sunaryanta, M.Pd	132221059	Pamong Belajar	S-2	III/c
115	Dra. Juyunah Nurlatifiah	132252824	Pamong Belajar	S-1	III/b
116	Supriyanto	132252811	Pamong Belajar	SMA	III/b
117	Drs. Budi Subagyo	132252814	Pamong Belajar	S-1	III/b
118	Abu Samyata, S.Pd	132252813	Pamong Belajar	S-1	III/b
119	Muh Cholid Arfian SE		Naban	S-1	Naban
120	Supriyanto		Naban	SMA	Naban
121	Yulianti		Naban	SMA	Naban
122	Sri Kusnoati		Naban	SMA	Naban
123	Woro Kapti		Naban	SMA	Naban
124	Suwarno		Naban	SMA	Naban

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Di bawah ini adalah data tabel prosentase mengenai SDM pada staf Dinas Pendidikan berdasarkan tingkat pendidikan, dengan pendidikan dari tingkat SMP sampai dengan S-2, dengan jumlah prosentase terbanyak yaitu lulusan SMA dengan jumlah 63 orang (50,81%), jumlah terbanyak kedua dari lulusan S-1 dengan jumlah 51 orang (41,13%), kemudian dari lulusan SMP dengan jumlah 5 orang (4,03%), dilanjutkan dengan S-2 dan D-3 dengan jumlah 3 dan 2 orang (2,42% dan 1,61%).

**Tabel III.6.**  
**Data Staf Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
SMP	5	4,03%
SMA	63	50,81%
D-3	2	1,61%
S-1	51	41,13%
S-2	3	2,42%
<b>Total</b>	<b>124</b>	<b>100,00%</b>

Pada tabel berikut ini adalah data prosentase dan jumlah berdasarkan golongan dan ruang, pada staf Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Dengan jumlah prosentase terbanyak yaitu terdapat pada golongan dan ruang III/b dengan jumlah pegawai 38 orang. Golongan dan ruang bagi pegawai kantor Dinas Pendidikan yang tidak terdapat di kantor tersebut yaitu golongan dan ruang I/b, IV/b, IV/c, dan IV/d. Kemudian jumlah pegawai terbanyak berikutnya adalah pada golongan dan ruang IV/a dengan jumlah pegawai 28 orang. Ada juga terdapat tenaga bantuan dengan jumlah pegawai 6 orang.

**Tabel III.7.**  
**Data Staf Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta**  
**Berdasarkan Golongan & Ruang**

Golongan	Ruang	Jumlah	Prosentase
I	a	2	1,61%
I	b	0	0,00%
I	c	2	1,61%
I	d	1	0,81%
II	a	5	4,03%
II	b	3	2,42%
II	c	7	5,65%
II	d	5	4,03%
III	a	9	7,26%
III	b	38	30,65%
III	c	10	8,06%
III	d	8	6,45%
IV	a	28	22,58%
IV	b	0	0,00%
IV	c	0	0,00%
IV	d	0	0,00%
Naban		6	4,84%
Jumlah		124	100,00%

**b. Kemampuan Sumber Daya Manusia**

Kemampuan dari Sumber Daya Manusia yang tersedia dalam proses implementasi pengalokasian anggaran pendidikan di Kota Yogyakarta menurut penuturan nara sumber di Dinas Pendidikan Kota, secara kualitas sudah memenuhi harapan. Bisa terlihat dalam pemaparan tabel di atas dimana tersedianya para implementor yang merata dan sehingga tidak terjadi masalah yang bisa menghambat jalannya implementasi, karena orang-orang yang dilibatkan sudah melalui proses pendidikan dan pelatihan, dan pada taraf berkualifikasi bagus dan terprogram.

Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan alokasi terdapat dana yang berlebih, maka menurut kesepakatan dana tersebut dikembalikan lagi ke kas daerah. Hal tersebut menggambarkan perhatian besar dan seriusnya pemerintah daerah dan kota dalam meningkatkan kualitas pendidikan, dengan harapan terealisasinya berbagai program kebijakan maka pembangunan dibidang pendidikan di Kota Yogyakarta akan berjalan dengan lancar.

e. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana prasarana khususnya seperti sekolah-sekolah yang masih ada contoh kondisi ruang kelas yang temboknya ternyata ada yang jebol sehingga ini termasuk kedalam sekolah yang masih belum memadai, dan kebanyakan standar untuk sekolah yang berkualitas masih sedikit yang bisa memenuhi, terutama pada fasilitas laboratorium sekolah yang fasilitasnya berkriteria seperti berikut: setiap sekolah memiliki laboratorium komputer; jumlah peralatan di laboratorium IPA dan komputer terpenuhi; sekolah memiliki jaringan internet; setiap sekolah memiliki ruang perpustakaan yang representatif.

### 3. DISPOSISI (SIKAP KECENDERUNGAN)

Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian juga sebaliknya apabila sikap-sikap dan perspektif implementor berbeda dari pembuatan keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Edward III (1980:89). Sikap kecenderungan yang terdapat pada subyek-subyek pada tahap implementasi alokasi APBD bidang pendidikan di Kota Yogyakarta, seperti sebagai berikut:

#### a. Kecenderungan Pelaksana Terhadap Tujuan Kebijakan

Kecenderungan pelaksana / implementor kebijakan terhadap tujuan kebijakan dan dalam melaksanakan beberapa kegiatan, mereka tidak boleh mengambil kebijakan sendiri-sendiri karena harus sesuai dengan komitmen yang telah diprogram bersama yang terdapat dalam dokumen RENSTRA (rencana strategis), sehingga program yang telah disepakati bisa berjalan dengan sesuai jadwal yang telah ditentukan<sup>21</sup>.

#### b. Sikap Pelaksana Terhadap Pelaksanaan Kebijakan

Secara internal para imlementor mendapat plafon tentang perancang kegiatan dalam tugas pokok dan fungsi sehingga mereka memiliki bagiannya masing-masing. Dan selain hal tersebut di atas,

<sup>21</sup> Hasil penuturan Bpk. Samiyo, S.Pd.

dalam pengalokasiannya pun Pemerintah Daerah dalam hal ini inspektorat daerah melakukan pengawasan dan mengaudit secara rutin.

c. Keinginan Pelaksana Untuk Menerapkan Kebijakan

Ada keyakinan yang tinggi dan tanggungjawab yang besar dalam mengemban tugas untuk melaksanakan sebaik mungkin, dan untuk kepentingan bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, dan untuk selalu menjaga kondisi pendidikan di Kota Yogyakarta karena predikatnya sebagai barometer pendidikan di tanah air sehingga segala sesuatunya diharapkan bisa menjadi tauladan untuk kemajuan pendidikan di tanah air, sehingga secara konsisten melaksanakan kebijakan dengan sebaik-baiknya.

#### 4. STRUKTUR BIROKRASI

Menurut Edward III, terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi, yaitu prosedur-prosedur kerja standar (*Standard Operating Procedures*) dan fragmentasi (*Fragmentation*)<sup>22</sup>.

a. Prosedur Rutin Birokrasi

Pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, prosedur rutin birokrasi dalam bentuk *Standard Operating Procedures*/Prosedur Kerja Standar dalam pelaksanaannya pada dasarnya sudah terdapat rutinitas prosedur yang sudah terjadi pada birokrasi yang menjadikan sasaran dan tujuannya yaitu masyarakat yang mengakses dalam bidang

---

<sup>22</sup> C. Edward III, George, *Implementing Public Policy*, (1980, 17).

pendidikan. Prosedur kerja standar yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, secara normatif ada, akan tetapi pada pelaksanaannya dalam kondisi yang mendesak maka prosedur yang digunakan yaitu dengan penetrasi atau terobosan-terobosan bagaimana tujuan/informasi bisa dicapai dengan lebih cepat dan tepat.

b. Fragmentasi Birokrasi

Fragmentasi yang merupakan suatu bentuk tekanan-tekanan yang berasal dari luar unit-unit birokrasi, seperti komisi-komisi legislatif, kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan, dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Dalam kasus di sini bentuk-bentuk fragmentasi ada tetapi tidak begitu berpengaruh besar atau tidak signifikan. Seperti tekanan dari LSM, dan Pakar Politik. Karena Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sudah menggunakan prosedur yang tepat secara organisatoris, jadi tekanan dan campur tangan dari pihak luar hanya diartikan sebagai bantuan sumbangan berfikir, dan tidak menjadikan suatu kebijakan mengalami perubahan, namun hanya sebagai kontrol yang membangun.

## **E. REKAPAN PERUBAHAN ANGGARAN**

Dalam tabel di bawah ini terdapat sejumlah uraian kegiatan yang terangkum dalam program-program dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta pada tahun 2008, dengan anggaran yang dialokasikan pemerintah kota baik anggaran secara murni maupun anggaran belanja tahunannya yang

berhubungan dengan pengalokasian APBD bidang pendidikan, dimana dalam perjalanannya terdapat perubahan anggaran sesuai dengan kebutuhan dalam porsinya masing-masing, dan tetap disesuaikan dengan ketentuan dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta :

**Tabel III.12.**  
**Rekapan Anggaran Perubahan**  
**Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun 2008**

N O	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN		
		MURNI	ABT	%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.479.937.000	5.671.811.400	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.479.937.000	5.671.811.400	55,72
	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas pendidikan Formal dan Non Formal	28.589.532.600	36.475.757.042	
1	Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah Negeri	8.679.462.600	8.839.462.600	61,58
2	Peningkatan Kompetensi Pendidikan Kejuruan	78.732.000	79.332.000	64,20
3	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Pintar	1.887.476.000	1.848.583.915	59,80
4	Penyelenggaraan Ulangan Umum	236.262.300	236.262.300	74,09
5	Penerimaan Siswa Baru On-Line	197.734.000	202.734.000	100,00
6	Pengembangan Kesiswaan	331.888.000	621.468.000	43,00
7	Penerbitan Media Komunikasi	41.717.000	54.947.000	63,00
8	Pengembangan Wawasan Keilmuan Pendidikan Menengah	163.495.000	166.908.000	71,00
9	Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat & Ujian Kesetaraan Paket A, B, & C	282.244.000	303.190.000	29,01
10	Pembinaan Prestasi Siswa dan Gugus Sekolah	60.268.000	69.988.000	28,34
11	Diklat Penulisan Soal bagi Guru SD,SMP,SMA,SMK	54.363.000	54.363.000	89,35
12	Usaha Kesehatan Sekolah & Lomba Kebersihan & Keindahan Lingkungan Sekolah	76.504.000	76.504.000	30,00
13	Penguatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	50.655.000	51.555.000	21,00
14	Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pendidikan Menengah	128.704.000	164.704.000	33,45
15	Pengembangan Minat dan Bakat Seni Siswa	182.480.000	182.480.000	38,59
16	Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	236.444.500	399.813.500	49,07
17	Pembinaan dan Pengembangan Program PAUD	93.631.200	146.786.200	50,00
18	Pengelolaan Data Kependidikan	88.055.300	88.055.300	50,00
19	Pembinaan Karier Pegawai	10.976.829.000	17.039.229.000	65,00

Tabel III.13.

**Rekapan Anggaran Perubahan  
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun 2008**

N O	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN		
		MURNI	ABT	%
20	Inovasi Media dan Strategi Pembelajaran	121.490.000	123.290.000	50,00
21	Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama dan Bahasa Inggris	54.065.000	58.915.000	64,00
22	Peningkatan Operasional Taman Pintar	588.596.100	1.688.749.627	27,97
23	Pengembangan Kota Vokasi	3.978.436.600	3.978.436.600	90,64
	<b>Program Wajib Belajar 12 Tahun</b>	<b>193.200.000</b>	<b>198.200.000</b>	
1	Pengelolaan Pemberian Beasiswa	193.200.000	198.200.000	73,00
	<b>Program Sertifikasi dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Akreditasi Sekolah, Standarisasi Sarana Prasarana</b>	<b>16.177.417.500</b>	<b>16.193.671.500</b>	
1	Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	263.786.000	263.786.000	34,00
2	Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan	1.278.645.000	1.282.680.000	45,30
3	Badan Akreditasi Sekolah Swasta Kota YK	27.925.500	27.925.500	100,00
4	Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan (DAK)	14.490.570.000	14.502.789.000	92,64
5	Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dana Rekonstruksi Non Perumahan	116.491.000	116.491.000	17,49
	<b>Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan</b>	<b>80.280.000</b>	<b>112.790.000</b>	
1	Perencanaan dan Pengkajian Pendidikan	80.280.000	112.790.000	33,00
	<b>Belanja Langsung</b>	<b>50.520.367.100</b>	<b>58.652.229.942</b>	
	<b>Belanja Tak Langsung</b>	<b>195.789.063.969</b>	<b>200.201.269.243</b>	
	<b>Jumlah</b>	<b>246.309.431.069</b>	<b>258.853.499.185</b>	
	<b>Bansos/Hibah (BPKD)</b>	<b>24.533.688.000</b>	<b>26.382.133.000</b>	
	<b>Jumlah Total</b>	<b>270.843.119.069</b>	<b>285.235.632.185</b>	

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta